

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat potensial untuk dijadikan sumber pemasukkan bagi negara, terlebih di Negara Indonesia yang memiliki keindahan alam yang tidak ada habisnya. Hal ini sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia terkenal dengan budaya dan sumber daya alamnya yang beragam, serta masyarakatnya yang heterogen. Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang luar biasa untuk menggerakkan kegiatan masyarakat, khususnya dengan mengembangkan sektor pariwisata.

Saat ini, pariwisata adalah salah satu bidang yang menjadi perhatian pemerintah (Hemas dan Asnawi: 2013). Menurut Ismayanti (2010), pariwisata merupakan suatu fenomena yang terjadi karena adanya interaksi antara wisatawan, penyedia jasa dan pemerintah dalam mendukung suatu kegiatan wisata. Interaksi tersebut membentuk suatu sistem yang saling terhubung satu sama lain, Setiap sektor memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan pariwisata yang bermutu tinggi sebagai hasil interaksi tersebut, yang menghasilkan suatu sistem yang saling terhubung. Agar dapat menjadi sumber devisa dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional, pariwisata sebagai penggerak perekonomian perlu dikembangkan lebih serius.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata didefinisikan sebagai berbagai kegiatan yang

berkaitan dengan pariwisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah. Sedangkan wisata sendiri dicirikan sebagai suatu pergerakan yang dilakukan oleh orang-orang atau perkumpulan dengan mengunjungi suatu tempat dengan tujuan akhir untuk rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari pada keunikan destinasi wisata yang dikunjungi dalam rentang waktu tertentu. Oleh karena itu, pariwisata juga merupakan salah satu industri yang memiliki efek berjenjang yakni mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga banyak daerah saat ini berlomba-lomba untuk mengembangkan pariwisata dan potensi lokalnya masing – masing. Salah satu daerah yang didorong untuk mengembangkan pariwisatanya adalah desa.

Sebagaimana yang terkandung dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa memerlukan perlindungan dan pemberdayaan agar dapat berkembang menjadi desa tangguh, maju dan mandiri. Namun, desa seringkali dipandang sebagai daerah dengan keadaan yang serba tertinggal dan kurang tersentuh modernisasi. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai pembangunan di pedesaan. Dewasa ini, salah satu tantangan yang nyata adanya dan menghambat program pemerintah dalam memberdayakan desa termasuk pula pariwisatanya adalah adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini mengubah pola kehidupan di masyarakat dimana masyarakat dipaksa untuk beradaptasi dengan pola kehidupan baru yang mengedepankan protokol kesehatan namun juga dituntut untuk tetap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 melalui sektor pariwisata salah satunya dengan gagasan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yaitu program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2021. Program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) menjadi salah satu terobosan penting di tengah pandemi COVID-19 dalam menjaga kestabilan ekonomi dikawasan pedesaan. Oleh karena itu, ditengah krisis pandemi COVID-19, pemberdayaan desa wisata melalui program ini diharapkan dapat mendorong kestabilan nasional sesuai dengan tema dalam program tersebut yaitu “INDONESIA BANGKIT”.

Kabupaten Banyumas mempunyai banyak potensi pariwisata yakni beberapa diantaranya meliputi wisata alam, budaya, dan kuliner. Desa yang akan saya teliti adalah Desa Cikakak yang berlokasi di Kabupaten Banyumas, tepatnya dibawah kaki Gunung Slamet. Adapun secara administratif, Desa Cikakak berada di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Beberapa destinasi pariwisata di Desa Cikakak meliputi Pasar Tradisional Antap, Masjid Saka Tunggal, Aza Craft (Kelompok Kerja Seni Kriya), Taman Kera, dan Embung Sabang Mas. Selain itu, Desa Cikakak juga memiliki wisata budaya yang berangkat dari adat istiadat setempat yakni Tari Lengger dan tarian lokal setempat yang mana masih dipegang dengan erat oleh masyarakat setempat. Wisata kuliner di Desa Cikakak beberapa diantaranya meliputi Ayam Gechok, Nasi Penggel, Mendoan, Wajik Kethek (Ketela Tekong) Oyek, Ketimus, Tirta Brahma, Es Badeg dan sejumlah kuliner khas daerah Banyumas lainnya.

Desa Cikakak menjadi salah satu desa yang diresmikan menjadi desa wisata pada tahun 2020 lalu di Kabupaten Banyumas. Desa wisata sendiri merupakan bentuk integrasi yang di dalamnya terdapat atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu adat tradisional yang berlaku. Pengelolaan Desa Wisata Cikakak saat ini dikelola oleh BUMDes dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Dalam hal ini, BUMDes dan Pokdarwis bertanggung jawab atas keberlangsungan Desa Wisata Cikakak. Selain itu, Pemerintah Desa Cikakak mempunyai peran sebagai pengawas sekaligus pendamping dengan memberikan saran maupun masukan kepada BUMDes dan Pokdarwis dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Disamping itu, terdapat peran dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (DINPORABUDPAR) Kabupaten Banyumas sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah yang berperan memberikan akses mengenai perizinan serta mensosialisasikan program desa wisata. Kemudian disisi lain juga terdapat peran dari swasta yang berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat disekitar dengan penyuluhan pelatihan keterampilan ataupun sebagai penyokong dana atau modal dalam pengembangan pariwisata pada masing – masing obyek wisata seperti halnya pembanguna n fisik dan sarana penunjang serta jumlah tenaga kerja.

Pada tahun 2021, Desa Wisata Cikakak dinobatkan menjadi salah satu desa wisata terbaik di Indonesia dalam rangka event Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 yang merupakan ajang pemberian penghargaan kepada

desa-desa wisata yang memiliki prestasi sesuai kriteria penilaian dari Kemenparekraf antara lain: penerapan CHSE (*Cleanliness, Healt, Safety, and Environmental Sustainability*), Desa Digital, Souvenir (Kuliner, *Fashion*, dan Kriya), Daya Tarik Wisata (Alam, Budaya, Buatan), Konten Kreatif, *Homestay*, dan Toilet. Desa Cikakak direkomendasikan DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas untuk mengikuti ADWI 2021 melalui mekanisme pengisian berkas secara *online*. Adapun daftar desa wisata yang lolos 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021 yakni:

Tabel 1.1. Daftar 50 Desa Wisata Terbaik di Indonesia Menurut ADWI Tahun 2021

No	Nama Desa Wisata	Asal Daerah
1.	Desa Wisata Nusa	Aceh
2.	Desa Wisata Tipang	Sumatera Utara
3.	Desa Wisata Huta Tinggi	Sumatera Utara
4.	Desa Wisata Sungai Batang	Sumatera Barat
5.	Desa Wisata Saribu Gonjong	Sumatera Barat
6.	Desa Wisata Kampuang Minang Nagari Sumpu	Sumatera Barat
7.	Desa Wisata Apar	Sumatera Barat
8.	Desa Wisata Ekowisata Burai	Sumatera Selatan
9.	Desa Wisata Koto Mesjid	Riau
10.	Desa Wisata Rigin Jaya	Lampung
11.	Desa Wisata Cikolelet	Banten

12.	Desa Wisata Sukarame	Bantem
13.	Desa Wisata Pulau Untung Jawa	DKI Jakarta
14.	Desa Wisata Perkampungan Budaya Betawi	DKI Jakarta
15.	Desa Wisata Alamendah	Jawa Barat
16.	Desa Wisata Cisande	Jawa Barat
17.	Desa Wisata Saung Ciburial	Jawa Barat
18.	Desa Wisata Gegesik Kulon	Jawa Barat
19.	Desa Wisata Selasari	
20.	Desa Wisata Dieng Kulon	Jawa Tengah
21.	Desa Wisata Sangiran	Jawa Tengah
22.	Desa Wisata Cikakak	Jawa Tengah
23.	Desa Wisata Pandanrejo	Jawa Tengah
24.	Desa Wisata Sumberbulu	Jawa Tengah
25.	Desa Wisata Karanganyar	Jawa Tengah
26.	Desa Wisata Kampung Blekok	Jawa Timur
27.	Desa Wisata Tamansari	Jawa Timur
28.	Desa Wisata Sanankerto	Jawa Timur
29.	Desa Wisata Ranunpani	Jawa Timur
30.	Desa Wisata Kampung Majapahit Bejijong	Jawa Timur
31.	Desa Wisata Serang	Jawa Timur

32.	Desa Wisata Kakilangit Mangunan	D.I Yogyakarta
33.	Desa Wisata Tinalah	D.I Yogyakarta
34.	Desa Wisata Rejowingangun	D.I Yogyakarta
35.	Desa Wisata Dewi Sambi	D.I Yogyakarta
36.	Desa Wisata Carangsari	Bali
37.	Desa Wisata Tanganan Pegringsingan	Bali
38.	Desa Wisata Sesaot	Nusa Tenggara Barat
39.	Desa Wisata Senaru	Nusa Tenggara Barat
40.	Desa Wisata Bonjeruk	Nusa Tenggara Barat
41.	Desa Wisata Detosoko Barat	Nusa Tenggara Timur
42.	Desa Wisata Wae Rebo	Nusa Tenggara Timur
43.	Desa Wisata Kole Sawangan	Sulawesi Selatan
44.	Desa Wisata Ara	Sulawesi Selatan
45.	Desa Wisata Lembang Nonongan	Sulawesi Selatan
46.	Desa Wisata Liya Togo	Sulawesi Tenggara
47.	Desa Wisata Religi Bubohu Bongo	Gorontalo
48.	Desa Wisata Ngilngof	Maluku
49.	Desa Wisata Kampung Yoboi	Papua

50.	Desa Wisata Arbororek	Papua Barat
-----	-----------------------	-------------

Sumber: Jadesta Kemenparekraf. 2021

Desa Wisata Cikakak saat ini sudah resmi menjadi binaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia (Effendi, 2021). Artinya desa Wisata Cikakak harus turut menyukseskan program-program yang telah diberikan Kemenparekraf. Desa Cikakak ditargetkan untuk menjadu desa wisata berkelanjutan dan menjadi barometer atau acuan bagi desa wisata lain di Kabupaten Banyumas yang selanjutnya dilakukan banyak pembenahan agar lebih matang ke depannya. Akan tetapi, pada kenyataannya, masih terdapat *gap* dalam proses pengelolaannya seperti *website* yang terbengkalai, sarana-prasarana yang belum dikembangkan secara optimal, dan konflik kepentingan antar *stakeholder* atau aktor.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan desa wisata dan serta aktor dalam keberhasilan terpilih menjadi 50 Desa Wisata Terbaik menurut Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Desa Wisata Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas?

2. Bagaimana relasi antar aktor dalam pengelolaan Desa Wisata Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengelolaan Desa Wisata Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas sejak awal hingga saat ini.
2. Untuk menganalisis peran dan relasi antar aktor dalam pengelolaan Desa Wisata Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide atau gagasan baru dalam upaya pengembangan pariwisata khususnya desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi maupun literatur tambahan mengenai analisis potensi desa wisata dan pemberdayaan masyarakat lokal. Selain itu, Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk penelitian sejenis berikutnya baik di bidang Ilmu Pemerintahan maupun diluar Ilmu Pemerintahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran atau sumbangan pemikiran kepada pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten

Banyumas maupun Pemerintah Desa Cikakak mengenai bagaimana strategi pengelolaan desa wisata yang ada dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat agar kedepannya seluruh desa maupun desa wisata dapat mempunyai program pemberdayaan yang berkualitas untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus pariwisata daerah.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan serangkaian tinjauan terhadap berbagai penelitian – penelitian yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan juga desa wisata. Beberapa penelitian terkait diantaranya adalah:

Pertama, penelitian ekonomi yang berjudul “Pengelolaan Desa Wisata dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Aceh Di Desa Wisata Besan Kabupaten Kalungkung” oleh Kadek Aris Puspantari (2022) menjelaskan bahwa akademisi, swasta, masyarakat, pemerintah, dan media merupakan lima komponen penting dalam pengelolaan Desa Wisata Besan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa dalam pembangunan terpadu. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa pengelolaan desa wisata dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa di Desa Besan Kabupaten Klungkung sudah berjalan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala seperti masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pariwisata yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dikarenakan budaya masyarakat Desa

Besan sebagai petani dan buruh sehingga perlu adanya pembinaan yang optimal.

Kedua, penelitian ekonomi berjudul “Pengelolaan Desa Wisata dengan Konsep *Green Economy* dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi pada Desa Wisata di Provinsi Lampung dan Jawa Barat)” yang dilakukan oleh Heni Noviarita *et al* (2021), penelitian ini membahas tentang dampak pandemic COVID-19 terhadap pendapatan masyarakat sebagai pengelola maupun masyarakat disekitar desa wisata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, seluruh desa wisata telah menerapkan konsep *Green Economy* dalam pengelolaannya, dan pandemic COVID-19 berdampak signifikan terhadap pelaku industry pariwisata termasuk pengelola desa wisata. Dampak utamanya adalah penurunan jumlah pengunjung yang secara otomatis berdampak pada penurunan jumlah pendapatan yang diterima pengelola wisata. Pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan pendapatan pengelola desa wisata sebsar 50% hingga 70%. Desa wisata yang pengelolaannya dilakukan oleh SDM berusia produktif dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan desa wisata ke depannya yang lebih kreatif dan produktif.

Ketiga, penelitian ekonomi “Pengelolaan Desa Wisata Giyanti dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat” oleh Ratna Hidayani dan Ahmad Guspul (2021), dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, penelitian ini membahas permasalahan terkait pendanaan dalam pengelolaan Desa Wisata Giyanti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Temuan

penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata Giyanti dalam pemberdayaan ekonomi rakyat sudah cukup baik dan dapat menjadi contoh bagi desa wisata rintisan lainnya yang ada di Kabupaten Wonosobo. Tim pengelola dan Pokdarwis Desa Wisata Giyanti telah berupaya keras, namun terkendala pendanaan sehingga belum dapat terealisasi secara maksimal. Banyaknya UMKM yang muncul menunjukkan keberhasilan sudah mulai terlihat meskipun belum signifikan. Selain itu, sebagian masyarakat saat ini sudah mendapatkan tambahan pendapatan dari adanya Desa Wisata Giyanti.

Keempat, penelitian ekonomi “Pengelolaan Desa Wisata Pandanrejo Menuju Desapreneur” oleh Lien Maulina *et al* (2022) Permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian adalah belum dirasakannya peningkatan ekonomi yang merata dan berkelanjutan oleh masyarakat melalui kegiatan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodenya. Berdasarkan hasil penelitian ini, pengelolaan Desa Wisata Pandanrejo memberikan dampak positif terhadap perekonomian, sosial, budaya, pendidikan, dan lingkungan. Sektor sosial memperoleh manfaat paling besar, sedangkan manfaat ekonomi belum dirasakan secara maksimal. Kelompok dan keanggotaan, kewirausahaan desa, kualitas produk dan jasa, tata kelola administrasi dan keuangan, pembinaan dan pendampingan desa, pemasaran dan promosi, keluasan dampak dan berkelanjutan merupakan upaya untuk menjadikan Desa Wisata Pandanrejo sebagai desapreneur.

Adapun penelitian terdahulu tersebut menggunakan perspektif ekonomi dalam menjelaskan fenomena dan rumusan masalah yang dimilikinya.

Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian peneliti adalah peneliti menggunakan perspektif pemerintahan untuk menganalisis rumusan masalah yang dimiliki dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan konsep *good governance* yang dalam konteks ini memiliki kausalitas dengan konsep manajemen obyek wisata.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1 Teori Manajemen Pemerintahan

Manajemen merupakan salah satu konsep yang dinamis dan dapat diaplikasikan dalam berbagai subjek atau konteks. Sebagaimana yang dinyatakan oleh R. Terry dalam Yoeti (1997: 194), manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari kegiatan – kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk memutuskan serta mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Praktik manajemen mulai membahas tidak hanya tentang kesulitan konseptual tetapi juga tantangan praktis yang berguna untuk mengatasinya. Tentu saja ini memerlukan perhatian mengenai kompleksitas, kerentanan, dan konflik (Head dan Sanderson dalam Head dan Alford, 2013). Kemudian, Jackson (2013) mendefinisikan manajemen sebagai suatu aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan. Manajemen adalah sebuah studi interdisipliner dari berbagai bagian umum organisasi dan merupakan campuran antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*

dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, data, dan politik (Keban dalam Nahdiyah, 2013).

Pembahasan terkait penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah bagaimana seluruh proses aktivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran yang tepat yakni berfungsi dan berdaya guna. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pemerintah yang efektif tidak dapat dilepaskan dengan manajemen pemerintahan.

Manajemen pemerintahan dapat diartikan sebuah proses bagaimana secara organisasional dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian, manajemen pemerintahan lebih fokus pada tahapan, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah gagasan dan kebijakan menjadi suatu program tindakan. Selanjutnya manajemen pemerintahan menyoroti terkait perencanaan, pengorganisasian dan penggerakkan, serta pengawasan yang dilakukan oleh manajer publik atau pejabat publik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Konsep dasar manajemen pemerintahan tidak lain adalah dari manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha merupakan “bagaimana menciptakan efektivitas usaha (*doing right things*) secara efisien (*doing things right*) dan produktif melalui fungsi dan skill tertentu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. (Ndraha, 2003: 159).

Fungsi – fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1 (Ndraha, 2003: 160), antara lain:

a. Perencanaan

Perencanaan mengandung arti persiapan atau penentuan-penentuan terlebih dahulu terkait apa yang akan dikerjakan di kemudian hari dalam batas waktu tertentu untuk mencapai hasil tertentu. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan perencanaan adalah memberikan jawaban atas persoalan yang berhubungan dengan apa (*what*), kenapa (*why*), serta gimana (*how*) sehingga tujuan yang konkret dan terukur dapat tercapai.

Perencanaan diharuskan memiliki pemikiran yang serius dan jelas serta melibatkan semua aktor maupun pelaku terkait sehingga proses dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat.

b. Pengorganisasian dan Penggerakkan

Pengorganisasian merupakan suatu aktivitas untuk membentuk jalinan dalam rangka menjalankan hubungan baik antara tiap-tiap bagian ataupun sub-sub bagian sehingga terjalin koordinasi yang baik antara individu yang terlibat dalam proses kolaborasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan penggerakkan sendiri dapat diartikan suatu tindakan untuk mengusahakan semua anggota kelompok bekerja dengan senang hati sehingga tujuan bersama dapat tercapai secara efisien dan efektif. Sehingga dapat dikatakan pengorganisasian dan penggerakkan adalah sebuah upaya untuk membentuk kelompok atau divisi dengan memaksimalkan anggota kelompok

atau divisi demi mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien serta dengan senang hati.

c. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses untuk menentukan aparat atau unit yang akan ditindaklanjuti untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber daya yang ada.

Manajemen pemerintahan juga menganut prinsip – prinsip seperti manajemen pada umumnya yaitu efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam menghimpun dan menggerakkan masyarakat, memperoleh dan memanfaatkan *budget*, serta mempergunakan dan memelihara peralatan demi tercapai tujuan program kegiatan bersama. Berdasarkan hal tersebut, manajemen pemerintahan bertanggung jawab dalam mengembangkan kemampuan aktor yang ada, membangun relasi antar aktor agar menciptakan suasana kerja yang bergairah sehingga kreativitas setiap aktor dapat dipacu dan pada gilirannya menjamin berlangsungnya inovasi secara terus menerus. Manajemen pemerintahan juga bertanggung jawab dalam meningkatkan kemampuan dan disiplin semua aktor terkait untuk menyelenggarakan tugas dan pokok pemerintahan yaitu:

1. Pelayanan (*Service*) akan menghasilkan keadilan dalam masyarakat
2. Pemberdayaan (*Empowerment*) akan mendorong kemandirian masyarakat
3. Pembangunan (*Development*) akan menciptakan kesejahteraan masyarakat

Teori manajemen pemerintahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Talidizuhu Ndraha. Karena dalam teorinya sudah mencakup manajemen secara keseluruhan, baik manajemen secara umum hingga manajemen pemerintahan. Dimana peneliti menggunakan tiga fungsi manajemen yaitu Perencanaan, Pengorganisasian dan Penggerakkan, serta Pengawasan.

1.6.2 Aktor

Definisi aktor atau stakeholder menurut menurut Freeman dan McVea (2001) merupakan setiap kelompok ataupun individu yang sanggup mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu organisasi atau program. Menurut Bryson (2004) mengartikan aktor/stakeholders dalam empat definisi, yakni:

1. Stakeholders merupakan seluruh kelompok yang akan dipengaruhi atau memberikan pengaruh terhadap strategi organisasi;
2. Setiap kelompok manapun atau organisasi yang dapat menjamin atau menuntut pertimbangan atas aset, atau hasil dari organisasi atau kelompok yang dipengaruhi oleh hasil organisasi tersebut;
3. Orang-orang atau kelompok kecil yang mempunyai kewenangan untuk menjawab, mengatur dan mengubah secara strategi masa depan suatu organisasi;
4. Individu atau kelompok yang mengandalkan pada organisasi untuk memenuhi tujuan mereka sendiri serta pada saat yang sama organisasi tersebut bergantung pada mereka.

Menurut Mathur *et al* (2007), para pemangku kepentingan ini sangat erat kaitannya dengan kekuasaan yang dimilikinya, oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi aktor – aktor yang terlibat sejak awal guna mendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan karena hal ini berkaitan dengan kepentingan, keterlibatan, pengaruh, sumber daya, dan kekuasaan yang dimiliki. Meningkatnya tuntutan publik terhadap bentuk – bentuk pelayanan publik maka mendorong komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan berbagai pendekatan yang ditempuh, salah satunya adalah pendekatan antar pemangku kepentingan yang menentukan hubungan dengan berbagai pihak baik dari pihak yang bekerja sama maupun pihak yang diluar kolaborasi, disinilah hubungan dan keterkaitan para aktor tersebut akan terlihat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mathur *et ,al* (2007) aktor – aktor dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu:

- a. Aktor Kunci, yaitu mereka yang memiliki kewenangan secara sah untuk mengambil keputusan. Aktor kunci ini mencakup unsur eksekutif sesuai dengan tingkatannya, legislatif dan lembaga – lembaga pelaksana program kebijakan;
- b. Aktor Primer, yaitu orang – orang yang memiliki kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, serta program ataupun proyek. Mereka adalah bagian dari proses pengambilan keputusan, khususnya dalam hal mempertimbangkan aspirasi publik dan penerapan aspek teknis kegiatan tersebut.

- c. Aktor Sekunder merupakan mereka yang tidak mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek. Akan tetapi memiliki perhatian dan kepedulian sehingga mereka juga turut menyuarakan dan berusaha mempengaruhi keputusan pemerintah.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Indikator-indikator yang digunakan dalam mengoperasionalisasi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rangkaian upaya pengelolaan yang dilakukan oleh Desa Wisata Cikakak dengan Teori (Ndraha, 2003: 160) antara lain:
 - a. Tahap Perencanaan: bentuk dan upaya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat
 - b. Tahap Pengorganisasian dan Penggerakkan: fokus aspek yang diberdayakan dalam rangka transformasi kemampuan serta pihak-pihak yang memberikan pelatihan kepada masyarakat.
 - c. Tahap Pengawasan: kemampuan aktor dalam monitoring dan evaluasi desa wisata dan destinasi serta pengaruh kepada masyarakat lokal terhadap keberjalanan desa wisata.
2. Aktor yang berperan dalam pengelolaan Desa Wisata Cikakak pada ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021 menurut Mathur *et ,al* (2007) diantaranya:

- a. Aktor Kunci: melakukan sebuah pembinaan, monitoring dan memutuskan sebuah keputusan secara sah atau resmi terhadap keberlangsungan pengelolaan desa wisata.
- b. Aktor Primer: melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan secara langsung serta menyerap aspirasi dari masyarakat.
- c. Aktor Sekunder: memberikan sumbangsih dalam bentuk tenaga, biaya atau harta benda sebagai upaya pengelolaan desa wisata.

1.8 Desain Penelitian

Dilihat dari jenis datanya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic melalui deskripsi dalam bentuk kata – kata dan Bahasa dalam konteks alami tertentu dengan menggunakan berbagai metode alamiah. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya untuk menggambarkan pemikiran kritis dalam memecahkan masalah yang ada berdasarkan data informasi.

Metode penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data terkait pengelolaan yang diterapkan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Desa, BUMDes, Pokdarwis Desa Wisata Cikakak serta masyarakat Desa Cikakak ini secara lebih mendalam dan lengkap. Selain itu, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat mengetahui upaya pengelolaan Desa Wisata Cikakak

dalam keberhasilan menjadi 50 desa wisata unggulan menurut Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021.

1.8.1. Situs dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Adapun subjek penelitian yaitu sumber data yang digali informasinya sesuai dengan topik penelitian (Arikunto, 2002). Untuk menghasilkan data yang sesuai maka perlu menentukan informan yang memiliki pengetahuan dan sesuai dengan kebutuhan data. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh, yaitu Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, Pemerintah Desa Cikakak, BUMDes Mitra Usaha Sejahtera, Pokdarwis Saka Tunggal, Tokoh Masyarakat serta Tokoh Adat Desa Wisata Cikakak.

1.8.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Bungkin (2006: 122), sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama atau objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer berasal dari wawancara dan observasi beberapa pihak terkait diantaranya Wardoyo S.IP (Dinporabudpar Kabupaten Banyumas), Akim (Pemerintah Desa Cikakak),

Jarwoto Andi Purnomo (BUMDes Cikakak), Kang Suto (Pokdarwis Saka Tunggal), Warso (tokoh masyarakat), dan Subagyo (tokoh adat).

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber data kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan disebut data sekunder. Data ini digunakan untuk melengkapi data primer agar penelitian ini dapat mencapai tujuan yang telah diterapkan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi strategi pengembangan dan pengelolaan, dokumentasi foto pada saat kegiatan wisata berlangsung.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Sujana (2007: 109) Observasi merupakan perangkat pengumpulan data yang digunakan untuk mensurvei cara berperilaku individu atau arah suatu tindakan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Peneliti menggunakan teknik observasi untuk mendapatkan data terkait desain strategi pada saat kegiatan wisata sedang berlangsung, dan fasilitas serta teknologi yang digunakan dalam aktivitas pariwisata.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan Tanya jawab secara lisan secara sepihak bertatap muka

dan dengan arah serta tujuan yang ditetapkan. Sudijono (1996: 82) menjelaskan terdapat beberapa kelebihan teknik pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan subyek yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, dapat lebih leluasa dan bermakna. Dalam penelitian ini teknik wawancara digunakan untuk mengungkapkan data mengenai proses pengelolaan di Desa Wisata Cikakak yang dilakukan oleh beberapa aktor yakni Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Banyumas, Pemerintah Desa Cikakak, BUMDes, Pokdarwis Desa Wisata Cikakak dan masyarakat Desa Cikakak serta bagaimana hubungan antar aktor tersebut dan perannya masing-masing.

3. Dokumentasi

Arikunto (2002: 206) mengatakan, metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Nawawi (2005: 133) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan wawancara dengan pejabat Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar), Pemerintah Desa, BUMDes, Pokdarwis, tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Wisata Cikakak.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Menurut patton (Moleong, 2001: 103) analisis data merupakan metode yang digunakan untuk mengatur urutan data, menyusunnya ke dalam suatu pola, klasifikasi dan uraian dasar. Definisi ini memberikan gambaran tentang seberapa penting posisi analisis data jika dilihat dari sudut pandang tujuan penelitian. Prinsip dasar penelitian kualitatif adalah menemukan hipoteses dari data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yang dikemukakan oleh Bungin (2003: 70) sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data adalah bagian mendasar dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan metode wawancara dan studi dokumentasi.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai cara yang paling umum dalam proses pemilihan, berfokus pada peningkatan dan perubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan karena pengumpulan data dimulai dengan membuat rangkuman, pengkodean, mengikuti tema, membuat kelompok, menulis memo dan lain sebagainya yang sepenuhnya bertujuan untuk menyimpan data informasi yang tidak relevan.

c. Display Data

Display data merupakan penggambaran sekumpulan data terorganisasi yang memberikan peluang untuk mencapai penarikan kesimpulan dan

mengambil tindakan. Penyajian data kualitatif berbentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berupa matrik, diagram, tabel dan grafik.

d. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Verification and Conclusion Drawing*)

Yakni proses akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan pentingnya data yang telah disajikan.

Terdapat aktivitas analisis data yang dilakukan antara penyajian data dan penarikan kesimpulan. Artinya, analisis data kualitatif merupakan upaya yang terus menerus, berkelanjutan, dan berulang. Terkait reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran hasil dalam pengelompokan sebagai perkembangan secara berurutan kegiatan analisis yang terkait. Kemudian, data yang telah dianalisis, dijelaskan dan ditafsirkan ke dalam kata-kata untuk menggambarkan fakta di lapangan, penjelasan makna atau menanggapi pertanyaan penelitian hanya diambil esensinya saja.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka setiap tahapan dalam proses ini diselesaikan untuk memperoleh keabsahan data dan informasi dengan menilai semua data dari berbagai sumber yang diperoleh dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi